KALIMANTAN TIMUR
Dewan Daerah Perubahan Iklim

STRATEGI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN BERKETAHANAN IKLIM, SEKTOR BERBASISKAN LAHAN

Fadjar Pambudhi

Kelompok Kerja Mitigasi Perubahan Iklim, DDPI KALTIM

Pengertian

- Pembangunan Rendah Karbon (PRK) yang Berketahanan Iklim adalah sistem pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat bersamaan membantu pencapaian tujuan penanganan Perubahan Iklim, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

- Paparan ini berfokus pada PRK sektor berbasiskan lahan (Kehutanan, Pertanian, Pertambangan)

Strategi nasional REDD+

Visi

Pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Misi

Mewujudkan visi pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan melalui tata kelola yang efektif yang dicapai dengan:

1. Memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut.
2. Menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan hukum.
3. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan gambut.

Visi SRAP REDD+ KALTIM

- Tata kelola sumberdaya hutan dan lahan di Kalimantan Timur yang mampu menyinambungkan keselarasan fungsi lingkungan dan manfaat ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat

Misi SRAP REDD+ KALTIM

Misi 1 : Memantapkan struktur dan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan

Misi 2 : Mengembangkan perencanaan pembangunan pada sektor berbasis hutan dan lahan

Misi 3 : Menyempurnakan peraturan dan meningkatkan penegakan hukum

Misi 4 : Meningkatkan kapasitas (pengetahuan, ketrampilan dan sikap) para pengelola

Tujuan

- Tujuan jangka pendek I (2012-2015): Perbaikan tata kelola klembagan
- Tujuan jangka pendek II (2016-2018) : Penyempurnaan tata kelola
- Tujuan jangka menengah (2012-2020):Terlaksananya tata kelola SDH-L
- Tujuan jangka panjang (2012-2030):
  - Hutan dan lahan, khususnya yang berada di Kaltim, menjadi net Carbon sink pada tahun 2030, untuk keberlanjutan fungsi dan jasa ekosistem hutan bagi pembangunan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat

Isu-isu utama sektor berbasiskan lahan, Kaltim, 2016.

Kehutanan	Pertanian	Perkebunan	Pertambangan	Lain-lain
• PHL-SFM belum maksimal • RHL • Pengelolaan kwsn konserv dan lindung • Kebakaran hutan	• Ekstensifikasi kemandirian pangan • Pemanfaatan lahan berhutan untuk pertanian gilir balik	• Konversi lahan berhutan menjadi perkebunan sawit skala besar	• Pembukaan lahan untuk pertambangan batubara	• Pembukaan dan pemanfaatan lahan untuk infrastruktur • Perambahan hutan • Konversi hutan mangrove dalam pengembangan tambak

Strategi jangka pendek, sektor berbasiskan lahan, Kaltim.

Kehutanan	Pertanian	Perkebunan	Pertambangan	Lain-lain
• Penguatan kelembagaan pengelola hutan dan lahan • Identifikasi kawasan rehabilitasi dan konservasi • Pengelolaan kwsn konserv dan lindung • Percepatan pembentukn MHA • Pengendalian kebakaran hutan dan lahan	• Pengembangan komoditas pertanian yang berorientasi pada sumberdaya local dan kebutuhan pasar • Penerapan teknologi budidaya yang adaptif dan ramah lingkungan • Peningkatan kualitas SDM dalam peningkatan dan pengembangan manajemen usaha tani	• Pengembangan perkebunan sebagai pilar ekonomi • Pengembangan jenis tanaman yang berpotensi dan bernilai ekonomi tinggi • Peningkatan produksi dan kualitas hasil-hasil perkebunan dengan intensifikasi	• Pemanfaatan lahan-lahan terbuka bekas tambang • Kajian detail tentang pemanfaatan air pada lubang bekas tambang	• Pengembangan kerangka dasar pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan • Pengelolaan lingkungan hidup dalam mewujudkan kelestarian lingkungan

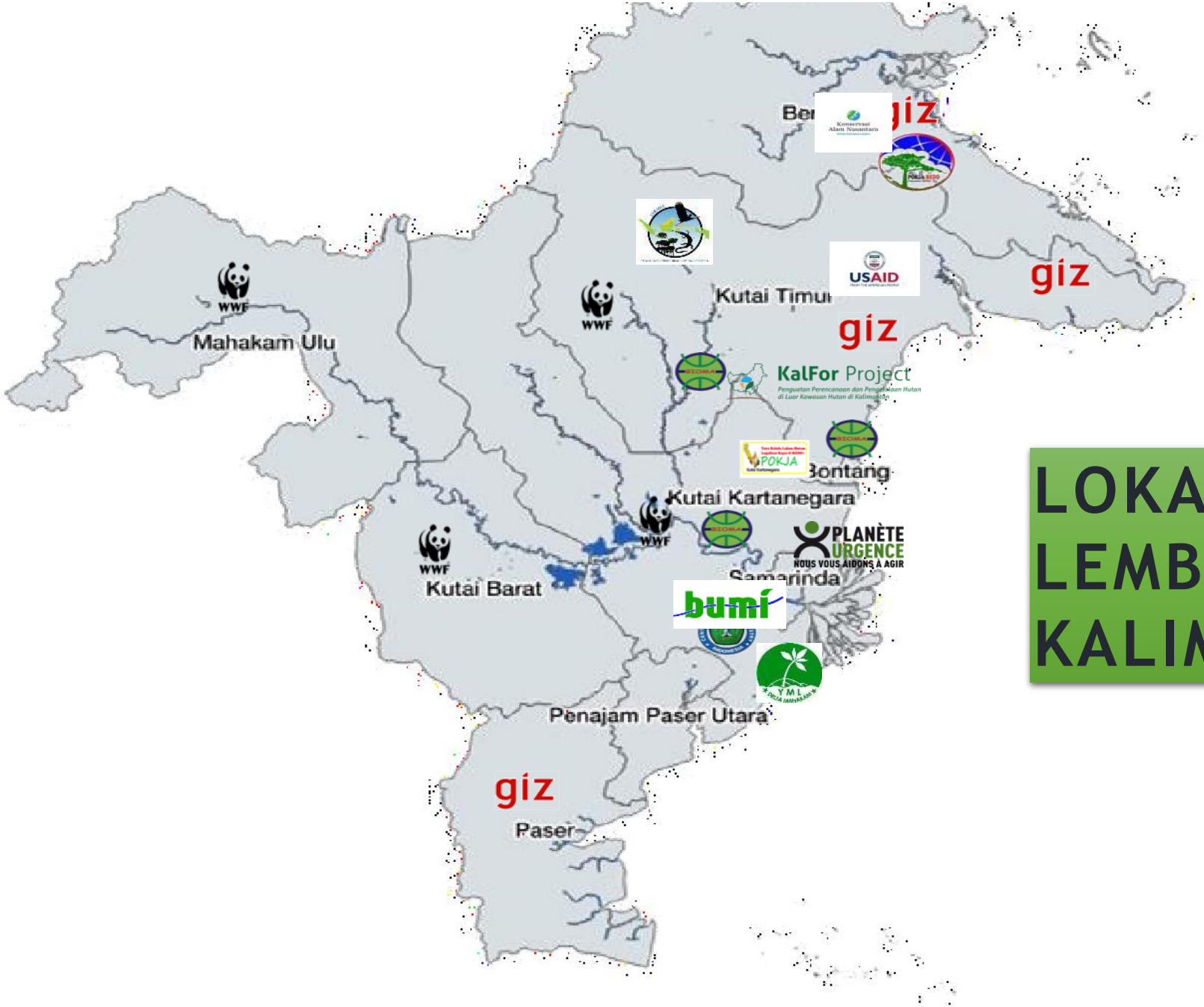

LOKASI KERJA LEMBAGA MITRA DI KALIMANTAN TIMUR

PERAN LEMBAGA MITRA MENDUKUNG PEMBANGUNAN HIJAU KALTIM

No	Nama Lembaga	Lokasi Kegiatan	Lingkup Kegiatan
1	WWF	Mahulu, Kukar, Kubar	Perlindungan Hutan, Perlindungan dan Restorasi Gambut, Perhutanan Sosial, Pengelolaan DAS, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Moratorium Perkebunan, MRV-REDD+, Kampung Iklim, Perencanaan Pembangunan Rendah karbon
2	Yayasan Konservasi Alam Nusantara (TNC)	Kaltim, Berau, Kutim	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Restorasi Hutan, Perkebunan Berkelanjutan, Pengelolaan SDA berbasis masyarakat
3	GIZ-LEOPALD	Kaltim	Perencanaan Perkebunan Berkelanjutan, Resolusi Konflik
4	GIZ FORCLIME	Kaltim, Berau	Penguatan KPH, Resolusi Konflik, REDD+, MRV REDD+, Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
5	Yayasan Bumi	Kaltim, Kukar	Keterbukaan Informasi Publik, Resolusi Konflik, Perhutanan Sosial, Eco Digital Movement, RTRW Desa
6	Yayasan BIOMA	Kukar	Restorasi Mangrove, RTRW Desa
7	Tropical Forest Conservation Action (TFCA)	Berau, Mahulu, Kubar, Kukar, Kutim	Perhutanan Sosial, Perlindungan Hutan di APL, Pencegahan Deforestasi
8	GGGI (Global Green Growth Institute)	Kaltim	eCBA KSP Maloy, Rencana Bisnis KPH, Dukungan ERPD, ERPA FCPF-CF
9	GIZ SCPOPP	Kutai Timur	RTRW Desa, RDTR Kecamatan, Smallholders Oil Palm, Rencana Perkebunan Berkelanjutan, ABKT, Resolusi Konflik
10	KALFOR - UNDP	Kutai Timur	Pengelolaan Hutan diluar Kawasan Hutan (ABKT)
11	SOLIDARIDAD INDONESIA	Paser, PPU	Sekolah Lapang Sawit, Pemetaan Kebun, Sertifikasi Smallholders, RTRW Desa,
12	Yayasan Konservsi Khatulistiwa	Kutai Timur	Restorasi Hutan Rawa, Pengembangan HHBK
13	GIZ - PROPEAT	Kaltim	Pengelolaan dan Rehabilitasi Gambut-Lahan Basah

STRATEGI PEMBANGUNAN RENDAH KARBON

STRATEGI PEMBANGUNAN KALIMANTAN TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN (2011)

Merupakan dasar strategi pembangunan Kaltim yang mempertimbangkan penurunan emisi gas rumah kaca

STRATEGI DAN RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REDD+ DI KALTIM (2012, 2014, 2016)

Menjadi rujukan dalam pelaksanaan REDD+ di Kaltim dan integrasi dalam rencana pembangunan

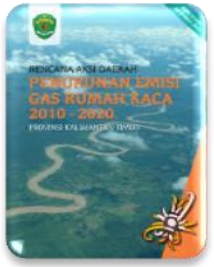

RENCANA AKSI DAERAH PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA KALTIM (2012, 2014, 2017)

Merupakan dasar penyusunan program para pihak dalam mitigasi perubahan iklim di Kaltim *(Pergub Kaltim No. 39/2014)*.

MASTER PLAN PERUBAHAN IKLIM KALIMANTAN TIMUR (2015)

Merupakan arahan mitigasi dan adaptasi strategi dan kebijakan perubahan iklim Kaltim *(diperkuat dengan Peraturan Daerah; 2018)*

TAHAPAN MEMBANGUN KEGIATAN PENURUNAN EMISI

DRIVER DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

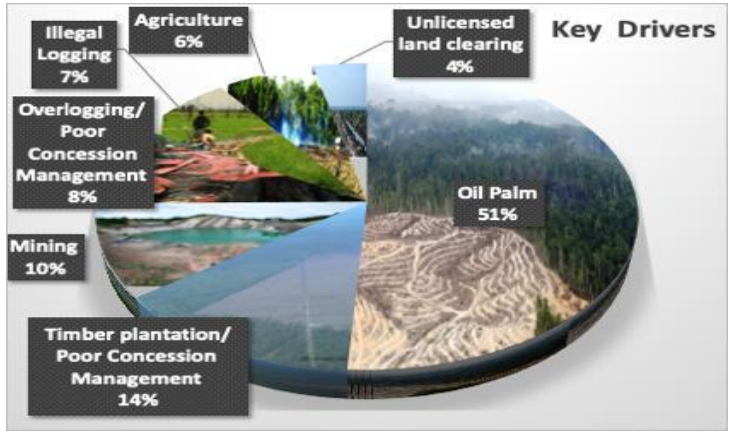

1. Perkebunan
2. Hutan Tanaman
3. Pertambangan
4. Pertanian Lahan Kering
5. Pemanenan Hutan Tidak Lestari
6. Pembalakan haram
7. Budidaya Perikanan (Tambak)

KOMPONEN PROGRAM PENURUNAN EMISI

KEGIATAN

4 Program
15 Sub-program
31 Kegiatan

Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan

- Memperbaiki tata kelola perizinan
- Penyelesaian konflik tenurial
- Dukungan pengakuan masyarakat adat
- Penguatan perencanaan desa

Penguatan Pembinaan Hutan dan Lahan

- Memperkuat kapasitas administrasi
- Penguatan kapasitas perangkat daerah bidang perkebunan dalam melakukan pembinaan untuk pengelola perkebunan

Mengurangi deforestasi dan degradasi hutan dalam areal perizinan

- Penerapan Pengelolaan Perkebunan
- Sistem pemantauan dan manajemen kebakaran berbasis masyarakat
- Penerapan PHPL dan RIL

Pengembangan alternatif penghidupan masyarakat berkelanjutan

- Pengembangan mata pencaharian alternatif
- Kemitraan konservasi
- Perhutanan sosial

Manajemen dan Pemantauan Program

- Koordinasi dan pengelolaan program
- Pemantauan dan evaluasi
- Komunikasi program

PEMBANGUNAN RENDAH EMISI SEKTOR KEHUTANAN

PENGELOLAAN USAHA KEHUTANAN BERKELANJUTAN (Sustainable Forest Management)

PHPL
SVLK

IMPLEMENTASI
RIL
REDUCED IMPACT LOGGING

- PHPL: 23 IUPHHK-HA dan 9 IUPHHK-HT
- 7 IUPHHK-HA menerapkan RIL
- Rerata luas tebangan/tahun: 76.393 hektare
- Rerata emisi : 8.403.284 tCO_2eq/tahun
- Rerata emisi RIL-C : 5.041.970 tCO_2 eq/tahun

PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

- Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum
- Pemantauan dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

REHABILITASI DAN REBOISASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

- 4 IPPKH sudah melakukan REHABLITASI DAS dengan luas 19.600 ha
- Rehabilitasi dan Reboisasi pada Hutan Lindung dan KSA/KPA

PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI BIODIVERSITY

- Perlindungan Badak Kalimantan, Orang Utan, Pesut, dan Buaya Badas
- Pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (KBKT)

POTENSI HCV DI KAWASAN HUTAN

IUPHHK-HA	572.113 ha
IUPHHK-HT	16.442 ha
Hutan Produksi Belum Berijin	260.887 ha

PERHUTANAN SOSIAL

PIAPS Perhutanan Sosial	332.258
PIAPS Kemitraan	307.805
PIAPS Keseluruhan	**640.063**

POKJA PERCEPATAN PERHUTANAN SOSIAL

PENGUATAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN

KPH CENTER

PEMBANGUNAN RENDAH EMISI SEKTOR PERKEBUNAN

1. **Deklarasi: "Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan 2030",** oleh gubernur dan semua bupati di Kaltim (September, 2017):
   - Mengutamakan produktivitas daripada perluasan kebun;
   - Perluasan kebun baru hanya dilakukan pada lahan dengan cadangan karbon rendah;
   - Percepatan pembangunan kebun berizin;
   - Evaluasi penataan perizinan;
   - Melindungi kawasan dng cadangan C tinggi 640 ribu ha pada hutan alam dan 50 ribu ha lahan gambut hingga tahun 2030;
   - Memastikan pelaku usaha perkebunan menerapkan ISPO.

2. **Pembentukan FKPB**
   Berlandaskan Pergub 52/2018 telah dibentuk Forum KPB di Kalimantan Timur, dimaksudkan sebagai wadah komunikasi multi pihak dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan pembangunan perkebunan berkelanjutan

3. **Pembentukan Satuan Tugas DALKARLABUN**
   Pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA)

4. **Pemanfaatan POME (Palm Oil Mill Efluent) sebagai sumber energi baru terbarukan**

5. **Penguatan Regulasi**

Pergub Turunan Perda
- Kriteria ANKT
- Pengelolaan ANKT
- Penetapan Peta Indikatif ANKT

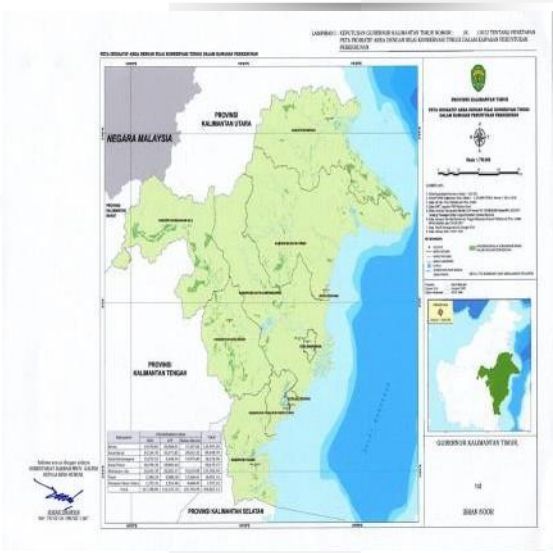

6. **Dikuatkan Komponen 3. Program FCPF-CF**

3.1. Peningkatan jumlah perusahaan perkebunan yang menerapkan ISPO, RSPO, dan NKT

3.2. Perusahaan berkomitmen dalam menerapkan praktek pelestarian yang mengarah pada pengurangan deforestasi melalui perbaikan pengelolaan dan perlindungan hutan yang masih ada di dalam areal perkebunan;

3.3. Perbaikan praktek pengelolaan oleh petani sawit mandiri yang mengarah pada pengurangan deforestasi di dalam dan di sekitar kebun mandiri;

3.4. Perbaikan kemampuan petani mandiri untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran

FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILTY (FCPF) CARBON FUND

1. Kalimantan Timur terpilih sebagai provinsi di Indonesia bagi pengimplementasian Program FCPF-Carbon Fund (**October 2015**)

2. Program FCPF Carbon Fund adalah program REDD+ (pengurangan deforestasi dan degradasi hutan), dengan perolehan insentif berbasis kinerja, dilaksanakan secara yurisdiksional di Kaltim, selama 5 tahun (2020-2024)

3. Syarat dokumen sebelum implementasi:
(1). Emission Reduction Program Idea Note (ERPIN)
(2). Emision Reduction Program Document (ERPD);
(3). MRV; (4). Safeguards; (5). Benefit Sharing Plan (BSP); (6). Emission Reduction Purchase Agreement (ERPA);

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menugasi DDPI sebagai lembaga koordinasi kegiatan persiapan pelaksanaan program FCPF-Carbon Fund di Kalimantan Timur (2016~2020)

AKAR MASALAH DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN

1. Kebijakan untuk melindungi hutan alam tersisa di dalam konsesi belum memadai
2. Kurangnya kerangka insentif yang kondusif
3. Perencanaan Tataruang yang belum optimal, mengarah ke batas penggunaan lahan tidak jelas
4. Kurangnya kemauan dan kapasitas untuk menerapkan praktik manajemen berkelanjutan
5. Rendahnya produktivitas pertanian lokal karena terbatasnya akses ke teknologi dan keuangan
6. Terbatasnya peluang mata pencaharian alternatif bagi masyarakat lokal
7. Kurangnya kapasitas pengawasan

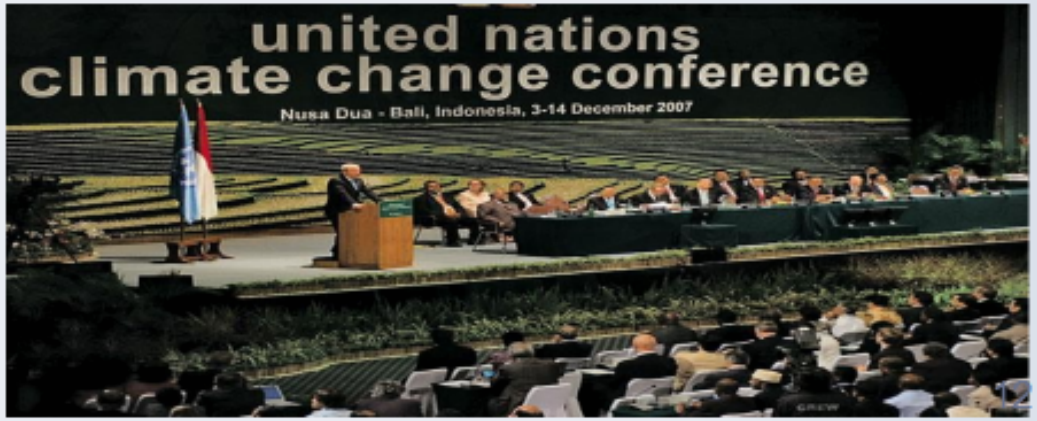

TERIMA KASIH